

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Buya Hamka, yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981, Hamka adalah seorang tokoh terkenal baik di Indonesia maupun diluar negeri, seperti di negara Malaysia dan Mesir. Hamka yang memiliki jiwa yang karismatik menjadikan dirinya terkenal di masyarakat luas, dengan ke aktivannya sebagai ulama, sastrawan, dan politisi. Hamka sebagai seorang ulama, senantiasa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun lebih dikenal sebagai cendekiawan Muslim, Hamka juga pernah terlibat dalam politik, baik dalam karyanya atau perannya selama terlibat di lembaga pemerintahan, seperti saat menjadi anggota Konstituante dari Partai Masyumi ataupun menjadi Pegawai Negeri di Kementrian Agama. Pemikiran Hamka yang bercorak Nasionalis-Modernisme tercermin dari karya-karya yang di tulis salah satunya yang berjudul Kapal Van Der Wijck bisa dilihat maksud dari karya ini, Hamka menghadirkan tokoh utama bernama Zainuddin yang mendapatkan diskriminasi karena status dan asal-usulnya sebagai anak keturunan campuran dimana ibu bapaknya bukan dari suku yang sama. Namun tokoh Zainudin terus berjuang dan membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan dari kualitas dan integritas dirinya.

Tokoh yang dihadirkan Hamka dalam karya tersebut merupakan kritik terhadap ketidakadilan sosial dalam budaya pribumi yang masih memandang kelas sosial sebagai penentu martabat seseorang. Selain itu, Hamka juga mengkritik budaya kolonial yang memperkuat hierarki dan pemisahan kelas di Hindia Belanda. Melalui karya ini Hamka ingin menumbuhkan jiwa nasionalisme yang menghargai kesetaraan dan kemerdekaan diri dari nilai-nilai hierarkis baik dari adat lokal maupun dari sistem kolonial. Menurutnya bangsa yang merdeka, tidak terikat oleh diskriminasi kelas atau garis keturunan. Mengenai pemikiran Hamka yang bercorak

pada nasionalis-modern juga tercermin dalam berbagai karyanya. Oleh karena itu, tidak mungkin Hamka mengabaikan persoalan tentang politik dalam tulisan-tulisannya. Meskipun tidak selalu secara eksplisit menggunakan istilah “politik” dalam judul karyanya, Hamka tetap menyampaikan pemikirannya mengenai politik melalui berbagai pembahasan. Salah satu contohnya terdapat dalam buku yang berjudul *Lembaga Hidup*. Dalam buku tersebut, pada sub-bab nya yang berjudul "Islam dan Politik," dalam pembahasannya Hamka menulis bagaimana Islam mengatur Hubungan Internasional antar negara dan toleransi dalam beragama terkhusus di kancan dunia. Maka jelas, Hamka menulis Islam dan politik dalam konteks kehidupan bernegara.

Hamka juga menekankan bahwa agama atau Islam bukan hanya mengatur aspek spiritual hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etika yang relevan untuk mengelola masyarakat dan pemerintahan. Hamka menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, berperan penting dalam menciptakan sistem politik yang adil dan bermoral. Menurut pandangannya, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam politik dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, sekaligus menjauhkan kehidupan politik dari praktik korupsi dan ketidakadilan. Di bagian ini, Hamka juga mengkritik praktik politik yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai agama dan lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok. Menurutnya, tujuan utama politik seharusnya adalah mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang tertentu.<sup>1</sup> Membahas mengenai tahun 1950-an merupakan kegiatan Hamka bisa aktif secara langsung dalam berpolitik ataupun dari tulisannya tentang perihal politik.

Dalam buku *Lembaga Hidup* juga Hamka menjelaskan bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip moral yaitu tunduk kepada suatu peraturan pri kemanusiaan,<sup>2</sup> yang menjadi dasar dalam mengelola hubungan antarnegara. Salah satu prinsip utama adalah keadilan, yang menjadi pedoman untuk memastikan bahwa setiap perjanjian internasional, penyelesaian konflik, maupun hubungan

---

<sup>1</sup>Hamka. *Lembaga Hidup* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984) hal. 237-251.

<sup>2</sup>Hamka. *Lembaga Hidup*..., hlm. 240.

diplomati dilakukan dengan mengedepankan keseimbangan dan tanpa memihak. Negara-negara Islam, menurut Hamka, memiliki tanggung jawab untuk menghormati kedaulatan bangsa yang lain, menjaga kesetaraan, dan tidak bertindak secara otoriter atau sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Hamka juga menggarisbawahi pentingnya perdamaian dunia, yang dapat dicapai melalui dialog terbuka dan saling pengertian, termasuk dengan bangsa-bangsa yang memiliki perbedaan agama atau budaya. Diplomasi, menurutnya, bukan hanya sekadar alat untuk memenuhi kepentingan negara, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kemanusiaan, dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan global. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menolak segala bentuk kolonialisme, ketidakadilan, atau eksploitasi. Selain itu, Hamka menyebutkan bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam membangun dunia yang damai dan harmonis. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip musyawarah (syura) dalam menyelesaikan konflik internasional. Prinsip ini tidak hanya menunjukkan nilai Islam yang adaptif, tetapi juga menawarkan pendekatan etis dalam diplomasi modern, dengan tujuan menjaga stabilitas global yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Selain membahas bagaimana Islam mengatur diplomasi dan toleransi, terlihat juga dalam tulisan selanjutnya, bagaimana jiwa nasionalisme perlu ditumbuhkan. Hamka menggambarkan bagaimana seseorang memiliki ikatan terhadap tanah kelahirannya. Tempat bermain, dibesarkan, dan belajar mengenal kehidupan. Walaupun orang tersebut merantau ke luar negeri, dimana orang tersebut melihat kemajuan pada negeri tersebut tetapi akan tetap rindu pada tanah kelahirannya. Hamka juga menyampaikan bahwa rasa cinta terhadap tanah air akan memotivasi untuk memajukan tanah air sendiri. Dalam tulisannya dalam buku *Lembaga Hidup*:

Sebab itu tidak ada tanah atau negeri yang lebih indah dalam mata seorang manusia yang halus perasaan, melebihi dari tanah airnya: „Hujan emas dinegeri orang, hujan batu di negeri awak, namun negeri awak teringat juga.” Di dalam melihat kelebihan yang dicapai oleh tanah air orang lain, bertambahlah cinta kita kepada tanah-air kita dan ingin supaya ia beroleh kelebihan pula. Jika ia

---

<sup>3</sup> Hamka. *Lembaga Hidup*... hlm. 238-246.

kebetulan ditimpa suatu sengsara, dan ada orang lain menyuruh menukarnya dengan yang lain, seorang pencinta tanah-air tiadakan sudi. Dan jika tanah-air seorang pencinta tanah air beroleh jaya di dalam perjuangan mencapai kedudukannya yang pantas, seorang pencinta tanah air akan berkata: „Aku ini adalah puteramu.<sup>4</sup>

Memiliki jiwa cinta tanah air dimana setiap warga negara bertanggung jawab dalam membangun bangsa bukan hanya sekedar perasaan emosional, tetapi juga bertanggung jawab, menjaga, membela dan memajukan negara salah satunya dorongan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam pemilu, kebijakan public dan membangun nasional. Bukan hanya rakyat atau masyarakat tetapi para pemimpin harus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Jelas juga Hamka dalam menuliskan cinta tanah air merupakan bagian dari Islam, tidak adanya pembeda atau pertentangan Islam dengan nasionalisme. Justru Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap tanah air sebagai bagian dari Amanah yang harus dijaga. Dalam buku *Lembaga Hidup* tertulis:

Mengapa Musa bersamadi di atas bukit Thursina? Ialah karena dia ingin kaumnya Bani Israil terlepas daripada perbudakan Fir'aun dan pulang ke tanah-airnya yang asli, tanah Palestina. Berhasil maksiudnya dan telah dapat bangsanya disebarkan melalui laut Kulzum, sesudah laut itu dibelah. Dan setelah dia dekat ke tanah Palestina, dari puncak sebuah bukit, dapatlah dia menunjukkan kepada bangsanya - "Itulah tanah yang telah dijanjikan buat kita, telah terbentang di hadapan mata kita!" Tetapi sayang, sebelum ia dapat tanah itu, Musa mati di atas bukit itu<sup>5</sup>

Maka jelas dalam kutipan diatas, menjelaskan bagaimana seorang Nabi yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi yang bukan hanya menyiarkan Islam kepada umatnya tetapi juga bagaimana menjadikan negerinya makmur, sejahtera dan menghilangkan ke dzoliman yang ada. Dan menumbuhkan kebahagiaan di tanah air tercinta. Melihat sekilas bagaimana perjuangan para leluhur dalam kemerdekaan

---

<sup>4</sup>Hamka. *Lembaga Hidup*..., hlm. 229-230.

<sup>5</sup>Hamka, *Lembaga Hidup*..., hlm. 230.

Indonesia yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol, agar terbebas dari penjajahan.<sup>6</sup>

Melihat kembali pada tahun 1950 Hamka memperjuangkan cinta tanah airnya dengan terlibat langsung dalam kegiatan politiknya. Seperti tulisannya diakhir tahun 1950-an, dimana situasi politik Indonesia yang semakin memanas baik antar parpol, presiden dan masyarakat. Hamka menuliskan pada Majalah Panji Masyarakat dengan Judul 'ISTIQOMAH'. Terbitan 15 Djuni 1959 No 1. Dapat disimpulkan dalam tulisannya ini Hamka menyoroti pentingnya keteguhan dalam prinsip untuk umat Islam yang mana pada saat itu aliran ideologi bertebaran di kalangan umat muslim seperti komunisme dan kapitalisme. Selain itu masyarakat muslim tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tulisan ini juga bentuk panggilan atau pengingat kepada para pemimpin muslim untuk konsisten pada prinsip Islam dalam membuat kebijakan politik yang adil dan bermoral.<sup>7</sup> Dalam tulisan dengan judul "ISTIQOMAH" pun setidaknya meredam suasana keresahan masyarakat muslim saat itu. Mengenai faktor sebab yang memunculkan pemikiran politik pada diri Hamka bisa dilihat dari;

#### 1. Latar belakang keluarga dan pendidikan

Hamka tumbuh dalam lingkungan Islami yang kuat, dipengaruhi oleh tradisi Minangkabau dan didikan ayahnya, Haji Rasul, seorang ulama pembaharu. Ayahnya yang kritis terhadap penjajahan dan adat yang bertentangan dengan Islam, serta pendidikan agama sejak kecil, menjadi fondasi moral dan etika dalam pemikiran Hamka, termasuk dalam politik.

#### 2. Inspirasi dari tokoh pembaharu Islam

Pemikiran tokoh Islam modern seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Rida turut membentuk pandangan Hamka. Konsep pembaruan

---

<sup>6</sup>Hamka, *Lembaga Hidup...*, hlm. 232.

<sup>7</sup>Hamka. "ISTIQOMAH". *Panji Masyarakat*, no 1, 15 Juni 1959, hal.3-4.

yang mereka ajarkan, seperti keadilan, kebebasan, dan musyawarah, menjadi prinsip utama dalam melihat hubungan Islam dengan politik.<sup>8</sup>

### 3. Mengalami kehidupan di bawah Kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan

Hidup di bawah penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan Indonesia memberikan Hamka pengalaman langsung tentang ketidakadilan. Hal ini menanamkan kesadaran akan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan bebas dari penindasan, dengan Islam sebagai landasan moralnya.

### 4. Keterlibatan di Organisasi Sosial dan Politik

Walapun Muhammadiyah bukan organisasi yang berurusan dengan politik secara langsung namun organisasi menjadi gebrakan atau dukungan atas keberhasilan didirikannya Partai Masyumi. Maka selama Aktivitas Hamka di Muhammadiyah dan Partai Masyumi memberinya kesempatan untuk berkontribusi dalam diskusi politik nasional. Melalui organisasi ini, ia terlibat langsung dalam isu-isu politik, seperti penerapan nilai Islam dalam pemerintahan dan penguatan demokrasi.

### 5. Dinamika Politik Indonesia pada 1950-an

Pada masa demokrasi liberal, berbagai ideologi seperti komunisme, nasionalisme, dan Islamisme berkembang pesat. Kondisi ini mendorong Hamka untuk mengambil sikap tegas dalam membela nilai-nilai Islam sebagai pedoman moral dalam kehidupan bernegara. Selain itu juga Hamka ikut bergabung dalam anggota konstituante dalam membentuk dasar Negara.

Selain faktor diatas adanya hak bagi setiap warga untuk berpolitik karena merupakan hak persamaan dimana politik tidak boleh di monopoli oleh segelintir orang atau kelompok elit. Dan juga warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam system pemerintahan. Hal ini juga merupakan konsep kedalautan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan

---

<sup>8</sup>Hamka. *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 104.



hanya ditangan penguasa atau segelintie elit politik. Seperti yang dituliskan Hamka dalam buku *Lembaga Hidup*:

Kalau telah beroleh hak persamaan, tidak boleh tidak mesti dapat pula hak politik. Artinya turut diberi hak supaya campur bertanggung jawab menyusun pemerintahan dan membuat undang-undang. Jangan dia hanya memikul beban saja, tetapi tidak beroleh hak. Hak politik di tangan orang banyak, bukan di tangan orang seorang atau di tangan beberapa orang saja. Hak yang demikian telah dilakukan di negeri-negeri yang dasar pemerintahannya tegak di atas demokrasi, yaitu pemerintahan yang tegak di atas kepercayaan orang banyak, yang disebut: "Kedaulatan Rakyat". Tiap-tiap warga berhak memilih wakilnya di dalam majelis rakyat. Di Eropa beberapa kerajaan telah mencoba ini, negeri Islam yang telah meningkat maju pun telah mencapai hak itu pula.<sup>9</sup>

Bila diamati dalam tulisan tersebut, jelas walaupun statusnya hanya sebagai warga atau berstatus tokoh agama seperti ulama. Tetap dalam dirinya memiliki hak dalam politiknya. Karena setiap pemimpin yang dipilih dan memangku kekuasaan, berhaklah setiap warga mengawasi bagaiman kinerja pemimpin tersebut dalam membangun negeri dan mensejahterakan warga.

Keikutsertaan Hamka dalam partai Masyumi yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1943 adalah bentuk perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imprealisme terhadap penjajah. Setelah berdirinya Masyumi bagi pihak dalam yaitu para tokoh perjuangan memiliki tujuan utama, yaitu untuk meraih kemerdekaan, bersiasat dalam perlawanan terhadap penjajah. Memanfaatkan kebijakan Jepang pada saat itu yang memberikan izin untuk membentuk organisasi sebagai alat propaganda Jepang. Hamka sebagai seorang yang peduli terhadap nasib bangsa, juga berkeinginan untuk melibatkan diri dalam politik dan pembebasan dari penjajah. Maka Hamka ikut masuk dan berkontribusi di Masyumi, dan adanya landasan keagamaan, dimana Masyumi juga didirikan dengan dasar-dasar Islam sebagai pijakan utama. Salah satu keikutsertaan Hamka terlihat dalam keterlibatan dalam perumusan dasar negara. Dimana dalam pidato-pidato dalam sidang konstituante, yang dapat disimpulkan Hamka sering mengemukakan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang mengatur ritual, tetapi juga mengatur sebuah sistem nilai yang mampu menjadi jiwa dan semangat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>9</sup>Hamka, *Lembaga Hidup...*, hlm. 22.

Dalam pandangannya, Islam memiliki kapasitas untuk memberikan arah moral dalam tata kelola negara. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis.

Hamka juga menekankan bahwa negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam bukan hanya menguntungkan umat beragama Islam saja, tetapi juga memberi jaminan kebebasan beragama bagi semua kelompok. Ia percaya bahwa penerapan hukum Islam dalam sebuah negara tidak akan menghilangkan hak-hak masyarakat non-Muslim. Sebaliknya, negara berbasis Islam justru memberikan ruang bagi penganut agama lain untuk mengamalkan ajaran agama mereka dengan bebas, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Lebih dari itu, Hamka berargumen bahwa Islam telah terbukti menjadi sumber inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Hamka sering menyebut bahwa semangat perjuangan yang berlandaskan seruan "Allahu Akbar" mengilhami keberanian rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Oleh karena itu, Hamka melihat Islam tidak hanya relevan sebagai pedoman atau mengatur spiritual, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun tatanan politik yang adil dan sejahtera. Hamka juga menggaris bawahi bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan harus menjunjung tinggi semangat toleransi, sehingga keberagaman bangsa Indonesia tetap terjaga. Dalam pandangan politiknya, Islam mampu menjadi perekat kebangsaan sekaligus penggerak bagi terciptanya keadilan sosial.<sup>10</sup>

Dalam buku *Lembaga Hidup* terdapat tulisan Hamka yang menuliskan kembali surat-surat politik Sayidina Ali Bin Abi Thalib. Salah satunya surat kepada Utsman bin Hunaifah Amirnya di negeri Bashrah.

Apakah aku akan tidur dengan perut kenyang, padahal di kelilingku rakyatku kelaparan dan jantungnya hangus kekuasaan? Adakah aku akan sebagai pepatah: .... *Cukuplah menjadi suatu penyakit bagimu, jika engkau tidur dengan perut kenyang, padahal di kiri kananmu temanmu meratap minta makan.* Apakah aku akan senang saja menerima gelar Amirul Mukminin. Padahal aku tiada sanggup turut menderita kesengsaraan zaman

---

<sup>10</sup>Konstituante Republik Indonesia. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Djilid III*. (Bandung: Tata Nusa, 1958) hlm. 56-79.



dengan rakyatku? Apakah aku akan menjadi contoh orang banyak di dalam hidup mewah? Sungguh, bukankah aku dihidupkan Allah untuk makan-makan saja sebagaimana binatang yang dipautkan di tambatannya, atau binatang yang lepas dari sambal mengunyah pawa, yaitu membalik-balikan apa yang di dalam perutnya kemulutnya untuk dikunyahnya lagi dan tidak peduli sekekelilingnya.<sup>11</sup>

Melihat dari tulisan tersebut, Hamka melihat bagaimana etika seorang Sayidina Ali bukan pemimpin yang hanya mencari makanan enak dan kehidupan nyaman, melainkan seseorang yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Hal ini juga mencerminkan kepemimpinan dalam Islam yang menekan Amanah dan kesederhanaan dalam mengelola kekuasaan. Hamka juga menunjukkan politiknya di tahun 1950-an menekankan politik yang harus dilandasi dengan nilai-nilai etika dan agama. Hamka menentang kediktatoran, penyalahgunaan kekuasaan, serta materialism dalam politik.

Dalam kegiatan sehari-hari Hamka juga banyak mengeluarkan aspirasi-aspirasi yang berisikan prinsip-prinsip Islam yaitu berbangsa dan berprrikemanusiaan, salah satunya beliau menulis artikel dan esai untuk majalah-majalah yang terafiliasi dengan Masyumi, Buya Hamka ikut serta dalam pertemuan dan kongres Partai Masyumi. Dalam forum ini, kebijakan partai dibahas, dan perencanaan strategi politik disusun. Buya Hamka dapat memberikan pandangan dan pemikirannya dalam diskusi tersebut. Sebagai seorang ulama, Hamka berjuang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diakui dan diimplementasikan dalam partai Masyumi. Ia mungkin turut serta dalam upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan Islam ke dalam program dan kebijakan partai. Selain aktif secara politik, juga memberikan arahan dan pemahaman keagamaan kepada anggota Masyumi. Hal ini dapat mencakup pandangan Islam terkait dengan kepemimpinan, keadilan sosial, dan isu-isu lainnya yang relevan dalam konteks politik.

Melihat kembali kondisi tahun 1950-1959 selain dengan faktor yang sudah dijelaskan diatas, pemikiran yang muncul dari peran Hamka dala politik yaitu bertepatan dengan Indonesia yang memulai babak baru dalam perjuangan politik

---

<sup>11</sup>Hamka. *Lembaga Hidup...*, hlm. 97-98.

setelah lepas dari belenggu penjajahan secara utuh dari yang sebelumnya sistem pemerintahan yang berbentuk Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), setiap negara bagian dalam RIS memiliki tugas dan kewenangan tertentu sesuai dengan sistem pemerintahan federal. Salah satunya terbentuknya sistem demokrasi liberal. Dalam hal ini para kabinet memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan struktur Pemerintahan. Kabinet merupakan tempat dimana terdirlnya para menteri yang memimpin departemen dan kementerian tertentu seperti dalam hal pertahanan, keuangan dan membantu presiden dalam mengambil keputusan dan mengelola pemerintahan sesuai dengan bidangnya, bertanggung jawab dalam memelihara stabilitas politik dan memajukan pembangunan di wilayah yang mereka pimpin.

Pada pertengahan tahun 1950 bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dengan pemerintahan yang bersifat demokrasi parlementer dimana pemerintahan diatur atau dipimpin oleh perdana Menteri, dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Keputusan ini diambil dari penilaian Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden bahwa bentuk Serikat atau Federal hanya cocok pada negeri-negeri yang sudah maju, sedangkan Indonesia masih dalam posisi negara yang berkembang. Dalam sistem pemerintahan ini tidak mengubah sistem kabinet, pada masa ini terbentuknya 7 kabinet, yang masing-masing kabinet ini ditempati oleh Partai Politik Masyumi, PNI, Komunisme dan partai lainnya.

Pada tahun 1950-an kabinet mulai memiliki tanggung jawab yang baru dalam memelihara stabilitas politik dan memajukan pembangunan di wilayah yang mereka pimpin. Secara keseluruhan tujuh kabinet pada saat itu memiliki tugas yang penting yaitu menjalankan keamanan dan ketertiban rakyat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan membebaskan Irian Barat, pada masa ini juga terbentuknya konstituante atau lembaga yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru bagi negara Indonesia. Yang dimana hal itu menjadi awal aktifnya Hamka dalam politik.

Tahun 1950-1951 kabinet dipimpin oleh Moh. Natsir menjadi kabinet awal berdiri setelah RIS berganti menjadi NKRI. Dalam kabinet ini melibatkan Masyumi dalam menjalankan tugasnya, namun kabinet Natsir bubar dikarenakan MOSI tidak percaya. Kabinet terus berganti sampai tujuh pergantian, namun yang lebih penting dalam tugas kabinet ini. Presiden Soekarno meminta agar pemilu berjalannya secepatnya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pada tahun 1955 kabinet Bahrudin Harapah yang menjalankan tugasnya di pemerintahan, salah satu tugasnya yaitu berjalannya pemilihan umum. Tujuan pemilihan ini untuk menempati kursi DPR dan Konstituante

Dari setiap partai politik sudah mengusung kandidatnya untuk duduk dalam pemilihan konstituante dan DPR. Akhirnya pemilihan ini dilaksanakan ditahun yang sama 1955, dalam pemilihan umum ini terpilihnya beberapa partai besar untuk menduduki kursi dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Salah satu partai yang terpilih, yaitu Masyumi dengan perolehan suara terbanyak ke tiga. Masyumi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi kursi konstituante atau fraksi yang terpilih dikenal berasal dari kalangan intelektual Islam dan tokoh-tokoh penting pergerakan nasional yang utamanya yaitu Mohammad Natsir, Muhammad Roem, Mohammad Isa Anshary, Mr. R.H. Kasman Singodimedjo, M. Rusjad Nurdin, Prof. H. Abdul Kahar Muzakir dan salah satunya yaitu Abdul Malik Karim Amrullah<sup>12</sup>. Sebelumnya dalam pemilihan umum ini Hamka di calonkan untuk menjadi anggota DPR mewakili pemilihan Masyumi di Jawa Tengah. Namun Hamka menolak, tetapi dengan segala pertimbangan akhirnya mengitu tetapi hanya membolehkan untuk mengumpulkan suara saja.

Sebelum dicalonkan Hamka sedang berada di Makassar sebagai dosen di Universitas Muslim Indonesia. Mendapatkan telegram dari pusat pemimpin Muhammadiyah, membujuk Hamka untuk menjadi anggota DPR-Konstituante. Telegram tersebut ditandatangani oleh ketua umum Muhammadiyah dan gurunya sendiri A.R. Sutan Mansur. Karena dibujuk akhirnya Hamka luluh dan mau duduk sebagai anggota Konstituante. Sebab pada dasarnya organisasi Muhammadiyah,

---

<sup>12</sup>Tomi Nurdamarsah, "Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959," *Jurnal Pendidikan*, no. 1 (2018), hlm. 24.

walaupun bergerak dalam bidang social dan Pendidikan, ikut bergabung juga dalam pendirian Masyumi dan menjadi anggota istimewa dari Masyumi.<sup>13</sup> Sebelumnya juga Moh. Natsir yang pada tahun-tahun ini menduduki ketua umum partai Masyumi sudah melihat potensi yang ada dalam diri Hamka dan aktivitasnya dalam dunia Islam hal ini juga sebagai strategi dalam persidangan konstituante. Karena ia melihat Hamka memiliki kesamaan terhadap ideologi politik.<sup>14</sup>

Melihat dari apa yang dipikirkan Hamka mengenai Politiknya. Disini penulis tertarik untuk membahas mengenai politik Hamka dan mengangkat topik atau penelitian mengenai **“Pemikiran Politik Buya Hamka Tahun 1950-1959.”** Adapun penulis mengambil tahun 1950-1959 karena pada tahun ini dimulai dari tahun 1950 runtuhnya pemerintahan federasi dan diganti menjadi negara NKRI dengan menggunakan dasar negara sementara tahun 1950. Situasi politik baru bagi Indonesia setelah lepas dari penjajah dan Presiden memerintahkan para Menteri untuk membentuk persiapan pemilihan umum pada tahun 1955 untuk menempati kursi Konstituante dalam merumuskan dasar negara. Partai Masyumi menjadi salah satu parpol terpilih dalam pemilihan umum tersebut dan sudah mewakili orang-orangnya yang akan ikut merumuskan salah satunya Hamka untuk merumuskan dasar negara konstituante. Selain itu tahun ini merupakan tahun yang aktif bagi Hamka terjun dalam politik aktif secara aktivitas dan tulisan politiknya ditahun-tahun ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pemaparan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang dianggap menjadi pokok permasalahan untuk menjadi bahan penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat politik Buya Hamka?
2. Bagaimana pemikiran politik Buya Hamka (1950-1959)?

---

<sup>13</sup>H. Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2016) hlm.7-9.

<sup>14</sup> M. Dzulfikriddin. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. (Bandung: Digital Publishing, 2016)

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan diatas maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui riwayat politik Buya Hamka
2. Untuk mengetahui pemikiran politik Buya Hamka (1950-1959)

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai Pemikiran Politik Buya Hamka Tahun 1950-1959. Kajian Pustaka yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut;

Pertama, Skripsi dari Mahasiswa bernama Saladin Yadi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati falkutas adab dan humaniora jurusan sejarah peradaban Islam, dengan judul “Pemikiran Pembaharuan Hamka Dalam Bidang Politik di Indonesia”. penelitian ini berfokus pada pembaharuan yang dilakukan Hamka dalam bidang politik di Indonesia. Pembaharuan yang dimaksud yaitu mengarah pada penerapan nilai-nilai Islam didalamnya walaupun terlihat sama, namun penelitian ini tidak membahas rentan waktu pembaharuan tersebut. perbandingan penelitian yang dilakukan penulis fokus melihat bagaimana corak pemikiran politik Hamka dengan rentan waktu tertentu selain itu menganalisis pemikiran politik Hamka selama mengikuti sidang konstituante.

Kedua, skripsi Ahmad Sammir Mahasiswa Sarjana jurusan Politik Islam Falkutas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penelitiannya yang berjudul Pemikiran Buya Hamka Tentang Etika Politik. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai permasalahan moral dalam politik. Seperti kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan fenomena ketidakadilan dalam pemerintahan Indonesia disebabkan menurut Hamka, orang-orang yang bukan ahlinya berani memegang tampuk kekuasaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis mengambil jurusan Sejarah peradaban Islam maka jelas dalam penelitian ini mengambil suatu peristiwa. Atau memaparkan bagaimana corak pemikiran politik hamka pada tahun 1950-an dimana pemikiran tersebut dilandaskan oleh

sebab akibat, atau peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut, hingga penulis dapat mengetahui bagaimana pemikiran Hamka terhadap politik.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa bernama Ahmad Khoirul Fata Pascasarjana Program Doktor dalam Bidang Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitiannya “Pemikiran dan Peran Politik Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)”. Penelitiannya ini berfokus pada pemikiran dan peran politik, gagasan kebangsaan dan keindonesiannya yang mencakup pada era demokrasi parelementer, orde lama, dan orde baru dan cakupan yang diteliti sangat luas. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis bagaimana corak pemikiran politik Hamka dalam rentan waktu yang terbatas yaitu hanya di tahun 1950-an. Dan menganalisis pemikiran politik hamka selama mengikuti sidang konstituante.

Keempat, Skripsi Sartiman Setiawan Mahasiswa Sarjana Jurusan Tafsir dan Hadis Falkutas Usluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitiannya berjudul “Penafsiran Hamka Tentang Politik Dalam Tafsir Al-Azhar.” Membahas penafsiran Hamka tentang tema-tema politik dalam Al-Qur’an dan dibukukan dengan judul tafsir Al-Azhar, maka penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu mengkaji salah satu karya tulisan Hamka. Sedangkan penulis dalam penelitian yaitu meneliti bagaiman corak pemikiran politik Hamka selama di tahun 1950-an dan melihat bagaimana gagasan ide politik Hamka selama mengikuti sidang konstituante.

Keempat, Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Amri, Endrika dan Delavia mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Falkutas Ushuluddin, dengan judul Integrasi Islam dan Politik Dalam Perspektif Hamka. Dalam Jurnal ini dibahas mengenai aturan politik Islam dalam pandangan Hamka dimana berlandaskan pada hukum alam, hukum moral, dan hukum fitrah manusia dan membahas adanya tujuan politik Islam. Berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas bagaimana corak pemikiran politik Islam Hamka dengan rentan waktu tertentu di tahun 1950-1959 dan melihat bagaimana pemikiran politik Hamka dalam sidang konstituante



## E. Metode Penelitian

Selanjutnya yaitu Metode penelitian, Metode penelitian yaitu menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan metode yang digunakan yaitu metode penelitian Sejarah.

### 1. Heuristik

Heuristik adalah yaitu tahapan dalam pengumpulan sumber sejarah. Yaitu kegiatan yang dimana mencari sumber untuk mendapatkan data-data.<sup>15</sup> Sebelumnya dalam penelitian penulis melakukan observasi tahapan sumber atau melakukan pencarian sumber baik di perpustakaan maupun di Internet. Sehingga didapatkanlah berbagai sumber yang dimana sumber tersebut adalah sumber tertulis dimana penulis telah mengklasifikasikan sumber tersebut yaitu sumber Primer dan sumber Sekunder:

#### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber-sumber yang sudah terjamin keaslian dan kredibilitasnya. Dalam hal ini sumber-sumber termasuk kepada sumber primer yang sejaman dengan pelaku Sejarah yang tentu berkaitan dengan ruang dan waktu. Disini penulis mendapatkan atau memperoleh sumber sumber primer berupa tulisan dan benda (Visual/Foto) diantaranya:

#### 1) Sumber Tertulis

##### a) Buku / Majalah

- (1) Hamka. 1950. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*” Jakarta: Ummunda.
- (2) Hamka. 1950. *Falsafah Ideologi Islam*. Jakarta: Widjaya.
- (3) Hamka. 2018. *Islam Revolusi dan Ideologi*. Depok: Gema Insani.
- (4) Hamka. *Kenang-kenangan Hidup 1: Autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950*. Jakarta: Bulan Bintang.
- (5) Hamka 1940. *Lembaga Hidup*. Jakarta: Panjimas.

---

<sup>15</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 93.

- (6) Konstituante Republik Indonesia. 1958 Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Djilid III. Bandung: Tata Nusa
- (7) Pandji Masyarakat No 6 Tahun Ke I TGL.1 September 1959 “Masyarakat Adil dan Ma’mur”. Hamka.
- (8) Pandji Masyarakat No 7 Tahun Ke I TGL.15 September 1959 “Pandangan Hidup Muslim. Bagi Dunia”. Hamka
- (9) Pandji Masyarakat No. 12 Ke I TGL. 1 Desember 1959. “Kebudayaan Nasional” Hamka.
- (10) Pandji Masyarakat No. 12 Ke I TGL. 1 Desember 1959. “Pandangan Hidup Muslim. Apakah Hidup” Hamka.
- (11) Pandji Masyarakat No 7, Tahun I. 15 September 1959 “Tjahja Baru Bagi Dunia” Hamka.
- (12) Pandji Masyarakat No 6 Tahun Ke I TGL.1 September 1959 “Said Djamaluddin Al-Afghany”. Hamka.
- (13) Pandji Masyarakat No 6 Tahun Ke I TGL.1 September 1959 “Utjapan Syukur dan Terimakasih” Hamka.
- (14) Pandji Masyarakat No. 5 Tahun ke I TGL 15 Agustus 1959 “Sembahjang Di Zaman Modern”. Hamka.
- (15) Pandji Masyarakat No. 5 Tahun ke I TGL 15 Agustus 1959 “Al-Mawaa’izh Sjaich Hasjim Asj’ari” Hamka.
- (16) Pandji Masyarakat No.4 Tahun Ke I TGL. 15 Agustus 1959 “Hidup dan Keindahan” Hamka.
- (17) Pandji Masyarakat No.1 Tahun Ke I TGL 15 Djuni 1959 “Istiqamah”
- (18) Pandji Masyarakat No. 13 Tahun Ke I TGL 15 Desember 1959 “Pidato Pengantar Hamka terhadap H.M JUNUS ANIS” Hamka.
- (19) Pandji Masyarakat No. 13 Tahun ke I TGL 15 Desember 1959 “Dari Djendela Ilmu” Hamka.

b) Arsip

- (1) Catatan keanggotaan sidang konstituante Buya Hamka diakses [https://konstituante.net/id/page/9--sejarah\\_konstituante.html](https://konstituante.net/id/page/9--sejarah_konstituante.html)
- (2) Teks pidato Hamka. ANRI (Arsip Negara Republik Indonesia)

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan didapatkan penulis dari hasil pencarian internet:

### 1) Sumber Tertulis

#### a) Buku/Majalah

- (1) Irfan Hamka 2013. Ayah: Kisah Buya Hamka. Jakarta: Republika.
- (2) Rusydi Hamka 2016. Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Jakarta: Mizan Digital Publishing.
- (3) M. Dzulfikriddin 2016. Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia. Bandung: Digital Publishing.
- (4) Hamka. 2016. Sejarah Umat Islam Pra kenabian hingga Islam di Nusantara. Jakarta: Gema Insan.

#### b) Tulisan dari Internet

- (1) Ulya, 2015. "Ūlū Al-‘Amr Perspektif Hamka Dan Negara berdasarkan Islam Di Indonesia Ulya." Nun, Vol. 1, No. 1
- (2) Dian Ismi Islami dan Reygi Prabowo, 2019. "Ideologi dan Aktivis Politik Buya Hamka Dalam Novel "Hamka: Sebuah Novel Biografi, Karangan Haidar Musyafa." Vol 2, No 1. Jurnal Pustaka Komunikasi.
- (3) Nurdamarsah Tomi. 2018. "Politik Masyumi Di Masa Demokrasi Parleментар 1950-1959." Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS Vol. 1, No. 1.
- (4) Wasul N. 2008. Perseteruan Partai Masyumi Dengan Partai Komunis Indonesia 1945-1960.
- (5) M. Yahya Rohmatuloh, 2022. *Konsep kepemimpinan Dalam Al-Qur'an: Studi Analitis dan Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an.

## 2. Kritik

Tahap kedua setelah pengumpulan data adalah tahapan kritik. Pada tahapan ini sumber-sumber yang telah dikumpulkan akan dilakukan penyeleksian. Tujuan dari tahapan kritik ini adalah otentisitas atau keaslian suatu sumber. Proses Kritik

meliputi dua macam, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Informasi yang harus di dapatkan dari kritik eksternal untuk menguji autentisitas sumber adalah nama pengarang, tanggal dari penulisan lisan, tempat dari penulisan, dan orisinilitas dari penulisan.<sup>16</sup> Sedangkan kritik intern untuk mengetahui keabsahan dan atau kredibilitas. Cara kerja kritik ini diantaranya:

a. Kritik Ekstern

Cara kerja dari kritik ekstern yaitu penulis harus melakukan pengujian keaslian atau tidaknya suatu sumber yang diuji berdasarkan aspek fisiknya. Cara kerja yang dapat dilakukan dari kritik ekstern meliputi beberapa pertanyaan yang harus diidentifikasi terhadap sumber yang didapatkannya, diantaranya:

- 1) Apakah sumber itu asli?
- 2) Apakah sumber itu utuh atau telah berubah-ubah?
- 3) Apakah sumber tersebut dapat diterima?

Dimana yang dimaksudkan jika sumber yang diperolehnya berupa buku, apakah dibuatnya dalam beberapa turunan atau cetakan. peneliti harus mengidentifikasi dari aspek keaslian atau tidaknya sumber tersebut berupa dokumen atau lainnya, jenis huruf, dan cap air pada tulisan tersebut jika sumber tersebut merupakan sumber tulisan).<sup>17</sup>

Adapun buku yang berjudul *Lembaga Hidup* yang terbit pada tahun 1940 di Jakarta. Buku ini ditulis langsung oleh Buya Hamka, secara fisik sampul pada buku ini sudah mulai rusak terlihat dari sampulnya yang sudah mulai sobek dan kertasnya sudah berwarna kuning kecokelatan, kertasnya pun mudah robek dan dari tulisannya pun hasil dari mesin tik lama dari buku ini juga masih mencangkup tempo waktu penelitian yang penulis lakukan. sumber ini juga merupakan sumber asli karena ditulis langsung oleh Buya Hamka.

Adapun sumber penulis yang didapatkan adalah sumber primer yaitu *Majalah Panji Masyarakat* yang terbit tahun 1959 di Jakarta. Walaupun penulis

<sup>16</sup> Sulasaman, *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, hlm. 101-104.

<sup>17</sup> Ading Kusdiana dan Samsudin, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi* (Bandung: Sejarah Peradaban Islam Falkutas Adab dan Humaniora UIN SGD, 2014), hlm. 31.

mendapatkan secara online namun, jika dilihat dan diamati kertasnya sudah kekuningan kecoklatan dan tulisan didalamnya pun belum menggunakan ejaan yang disempurnakan.

b. Kritik Intern

Cara kerja dari kritik intern yaitu untuk menghindari ke keliruan dalam bukti informasi sumber. Sehingga penulis melakukan pengecekan Kembali isi dari sumber yang diperoleh. Biasanya mengkritik untuk memeriksa kebenaran konten Bahasa, keadaan penulisan, gaya dan ide dalam sumber lisan atau tulisan.

Dalam Proses melakukan kritik intern ini ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap sumber tersebut, diantaranya:

- 1) Melakukan penelitian terhadap sumber
- 2) Memperhatikan pengarang sumber, jika sumber yang didapatkan adalah berupa sumber lisan maka hal tersebut harus diperhatikan seorang peneliti yaitu memastikan apakah narasumber dapat memberikan kesaksian dan kebenaran? Sehingga dua hal ini menjadi pokok dalam mengidentifikasi kehadiran narasumber tersebut pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tersebut, kemudian keahlian narasumber tersebut dan intensitas narasumber atau saksi dengan peristiwa tersebut. Jika yang didapatkan sumber tulisan berupa buku yaitu melihat dari pengarangnya, siapa penulisnya apakah dia adalah saksi dari peristiwa tersebut atau yang pernah terlibat dalam peristiwa tersebut.
- 3) Peneliti harus dapat membandingkan sumber, anantara sumber satu dengan sumber satu lainnya hal ini dilakukan agar menghubungkan kesaksian dari saksi lainnya.
- 4) Dalam Sumber tersebut didapati adanya saling keterdukungan unsuu tersebut.<sup>18</sup>

Adapun sumber penulis yang di dapatkan pada buku Kenang-kenangan Hidup 1: Autobiografi sejak lahir 1908 sampai tahun 1950 karya Buya Hamka. buku

---

<sup>18</sup> Ading Kusdiana dan Samsudin, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Skripsi ...*, hlm. 31.

ini menjelaskan mengenai riwayat hidupnya dari tahun kelahiran beliau sampai dengan tahun 1950. Sehingga sumber ini kredibel untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

Pada Majalah Pandji Masyarakat dengan Judul “ISTIQOMAH” majalah ini didapatkan secara digital dari penjual arsip lama. Maka sudah dipastikan majalah ini asli. Tulisan dalam majalah ini merupakan tulisan Buya Hamka sendiri. Maka majalah ini bisa digunakan sebagai sumber penelitian karena terbukti keaslian dan keabsahannya.

Pada arsip catatan keanggotaan Buya Hamka di Konstituante penulis mendapatkannya dari website dengan alamat web [https://www.konstituante.net/index.php/id/page/9--sejarah\\_konstituante.html](https://www.konstituante.net/index.php/id/page/9--sejarah_konstituante.html). Web ini mempersentasikan arsip-arsip keanggotaan sidang konstituante dari tiga partai pada saat itu salah satunya Partai Masyumi. Dengan adanya sumber ini dipastikan bahwa benar terlibatnya Buya Hamka dalam sidang tersebut. Web tersebut mendapatkan sumber arsipnya dari perpustakaan. Sehingga arsip ini kredibel untuk digunakan sebagai sumber dalam penelitian.

### 3. Interpretasi

Setelah memperoleh sumber-sumber yang didapatkan melalui tahap heuristik dan telah lolos dari proses kritik, maka tahapan selanjutnya adalah tahap interpretasi (penafsiran). Dalam Tahapan ini penulis guna menganalisis dan mensintesis sumber-sumber yang telah menjadi fakta-fakta sejarah yang akan direkonstruksi.<sup>19</sup> Disini penulis mencoba penguraian terhadap fakta yang didapatkan, untuk melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusun menjadi interpretasi dan menjadi suatu analisis. Dan penulis juga memproses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologis peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah dan menjadi suatu sintesis. Selain itu, menghindari keobyektifan penulis, saat pada akhirnya penelitian ini tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pihak manapun. Adapun metode yang digunakan yaitu deskripsi-

---

<sup>19</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 102-103.



analisis yaitu interpretasi analisi merupakan sebuah cara untuk menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu.<sup>20</sup>

Maka dari itu saya dalam membahas tokoh Buya Hamka akan menggunakan kerangka kerja teori kepemimpinan yang lebih inklusif seperti teori kharismatik atau teori transformasional. Teori Kharismatik yaitu daya tarik dari seseorang pemimpin dalam memengaruhi dan menginspirasi pengikutnya. Selain itu seseorang yang memiliki pandangan yang jelas dan menarik, menanamkan keyakinan bahwa tujuan mereka dapat dicapai. Sementara teori transformasional menekankan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, panutan, mendapatkan penghormatan dari pengikutnya. Buya Hamka dikenal sebagai seorang ulama yang banyak memengaruhi orang melalui ceramah, tulisan dan intelektualnya. Dalam penyampaian Hamka mengenai integrasi nilai-nilai Islam, begitu kuat dan kepribadian yang benar-benar seorang ulama yang rendah hati namun tegas membuat beliau dihormati dan diikuti banyak kalangan. Hamka juga menginspirasi umat Islam untuk berkontribusi dan membangun bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam atau memiliki moral agama dalam kehidupan. Dalam tulisannya pun mendorong umat untuk berpikir kritis tentang agama, politik dan kehidupan.

Bisa dilihat dalam sidang konstituante, Hamka memunculkan sikap rendah hati namun tegas dan kemampuan berbicaranya sering kali membuat pendengar tergerak tidak hanya secara intelektual tetapi juga emosional. Dalam sidang ini Hamka memperjuangkan ide agar Islam dijadikan dasar negara Beliau juga mempengaruhi emosional dengan anggota konstituante melalui perjuangan bangsa Indonesia dan tidak lupa akan keberanian mengambil sikap dimana Hamka dengan lantang menyuarakan keyakinannya walaupun bisa jadi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendukung paham sekularisme. Dalam sidang konstituante, hamka menyurakan bagaimana proklamasi didorong oleh umat Islam Indonesia yang 90% adanya dorongan Allahu Akbar. Dalam pidatonya di sidang konstituante:

---

<sup>20</sup>M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 226.

Semangat Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, menurut Hamka, bukanlah Pancasila. Ia berpendapat bahwa jika Bung Karno – seorang pemikir besar pada zamannya – benar-benar menganggap semangat proklamasi sebagai Pancasila, maka Pancasila itu seharusnya telah ada sejak awal. Namun, Bung Karno dikenal sebagai intelektual yang cermat dalam memilih kata-kata yang mampu menyemangati rakyat. Semangat proklamasi sebenarnya hanyalah seruan kemerdekaan, yang disambut oleh mayoritas umat Indonesia, sekitar 90%, melalui seruan ‘Allahu Akbar.’ Baik dari kalangan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), maupun mahasiswa perguruan tinggi yang terdidik dengan pemikiran Barat, mereka semua mendekati para ulama untuk memohon keberkahan ‘Allahu Akbar.’ Oleh karena itu, jika ada yang menyatakan bahwa semangat Proklamasi 17 Agustus itu adalah Pancasila, hal tersebut menurut Hamka jauh dari kebenaran dan merupakan kebohongan. Kebohongan, seperti yang pernah diungkapkan oleh Abraham Lincoln, hanyalah sebuah kenyataan sementara bagi suatu kelompok, dan tidak dapat berlaku untuk setiap masa dan seluruh golongan.<sup>21</sup>

Keberanian inilah yang terlihat dari pidatonya yang menjadikan dirinya dikenal sebagai seorang ulama yang tegas namun tidak keras dan orang-orangpu menganggumi dan mengikuti dari sifatnya dan sikapnya.

#### 4. Historiografi

Tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi (penulisan sejarah). Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Dari sudut pandang etimologis, historiografi bersal dari bahasa Yunani, yaitu *historia* dan *grafein*. *Historia* berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan *grafein* berarti gambaran, lukisan atau uraian.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan bentuk penulisan penelitian skripsi yang sistematis, maka penulis membagi penelitian ini ke dalam tiga bab dan beberapa bab masing-masing memiliki sub bab yang terperinci. Sebagai berikut:

**BAB I** membahas pendahuluan, yang di dalamnya berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Langkah-langkah atau Metode Penelitian.

**BAB II** yaitu membahas riwayat politik Buya Hamka yang berisi biografi atau latar belakang keluarga, pendidikan, karya dan penghargaan

<sup>21</sup>Konstituante Republik Indonesia. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Djilid III ...*, hlm. 58.

<sup>22</sup> Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah ...*, hlm. 147.

**BAB III** yaitu membahas inti dari penelitian yang di dalamnya membahas mengenai pemikiran politik Buya Hamka.

**BAB IV** yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Menyimpulkan pembahasan yang penulis paparkan pada bab II dan III. Selain itu pada bagian akhir penelitian ini terdapat daftar sumber yang memuat informasi mengenai sumber atau referensi yang penulis guna mendukung pembuatan penelitian ini dan lampiran-lampiran.

